



DERAJAT KESUKARELAAN PARTISIPASI

Fakultas Ilmu Sosial dan Politik
Universitas Medan Area

Derajat Kesukarelaan Partisipasi



Kata kunci dari pengertian partisipasi masyarakat dalam pembangunan adalah adanya kesukarelaan (anggota) masyarakat untuk terlibat dan atau melibatkan diri dalam kegiatan pembangunan. Berkaitan dengan tingkat kesukarelaan masyarakat untuk berpartisipasi, Dusseldorp (1981) membedakan adanya beberapa jenjang kesukarelaan sebagai berikut:

- a) **Partisipasi spontan**, yaitu peranserta yang tumbuh karena motivasi intrinsik berupa pemahaman, penghayatan, dan keyakinannya sendiri;
- b) **Partisipasi terinduksi**, yaitu peranserta yang tumbuh karena terinduksi oleh adanya motivasi ekstrinsik (berupa bujukan, pengaruh, dorongan) dari luar; meskipun yang bersangkutan tetap memiliki kebebasan penuh untuk berpartisipasi;

Lanjutan...



- c) **Partisipasi tertekan oleh kebiasaan**, yaitu peranserta yang tumbuh karena adanya tekanan yang dirasakan sebagaimana layaknya warga masyarakat pada umumnya, atau peran serta yang dilakukan untuk mematuhi kebiasaan, nilai-nilai, atau norma yang dianut oleh masyarakat setempat. Jika tidak berperan-serta, khawatir akan tersisih atau dikucilkan masyarakatnya;
- d) **Partisipasi tertekan oleh alasan sosial-ekonomi**, yaitu peran-serta yang dilakukan karena takut akan kehilangan status sosial atau menderita kerugian/tidak memperoleh bagian manfaat dari kegiatan yang dilaksanakan;
- e) **Partisipasi tertekan oleh peraturan**, yaitu peranserta yang dilakukan karena takut menerima hukuman dari peraturan/ketentuan-ketentuan yang sudah diberlakukan.

Syarat Tumbuhnya Partisipasi Masyarakat



Tabel 1. Tipologi Partisipasi

NO	TIPOLOGI	KARAKTERISTIK
1	Partisipasi pasif/ manipulatif	<ul style="list-style-type: none">▪ Masyarakat diberitahu apa yang sedang atau telah terjadi▪ Pengumuman sepihak oleh pelaksana proyek tanpa memperhatikan tanggapan masyarakat▪ Informasi yang dipertukarkan terbatas pada kalangan profesional diluar kelompok sasaran
2	Partisipasi informatif	<ul style="list-style-type: none">▪ Masyarakat menjawab pertanyaan-pertanyaan penelitian▪ Masyarakat tidak diberi kesempatan untuk terlibat dan mempengaruhi proses penelitian▪ Akurasi hasil penelitian tidak dibahas bersama masyarakat

Lanjutan...



NO	TIPOLOGI	KARAKTERISTIK
3	Partisipasi konsultatif	<ul style="list-style-type: none">▪ Masyarakat berpartisipasi dengan cara berkonsultasi▪ Orang luar mendengarkan, menganalisis masalah dan pemecahannya▪ Tidak ada peluang untuk pembuatan keputusan bersama▪ Para profesional tidak berkewajiban untuk mengajukan pandangan▪ Masyarakat (sebagai masukan) untuk ditindaklanjuti
4	Partisipasi insentif	<ul style="list-style-type: none">▪ Masyarakat memberikan korbanan/jasanya untuk memperoleh imbalan berupa insentif/upah▪ Masyarakat tidak dilibatkan dalam proses pembelajaran atau eksperimen-eksperimen yang dilakukan▪ Masyarakat tidak memiliki andil untuk melanjutkan kegiatan-kegiatan setelah insentif dihentikan.
5	Partisipasi fungsional	<ul style="list-style-type: none">▪ Masyarakat membentuk kelompok untuk mencapai tujuan proyek▪ Pembentukan kelompok (biasanya) setelah ada keputusan-keputusan utama yang disepakati▪ Pada tahap awal, masyarakat tergantung kepada pihak luar, tetapi secara bertahap menunjukkan kemandiriannya.

Lanjutan...



NO	TIPOLOGI	KARAKTERISTIK
6	Partisipasi interaktif	<ul style="list-style-type: none">▪ Masyarakat berperan dalam analisis untuk perencanaan kegiatan dan pembentukan atau penguatan kelembagaan.▪ Cenderung melibatkan metoda interdisipliner yang mencari keragaman perspektif dalam proses belajar yang terstruktur dan sistematis▪ Masyarakat memiliki peran untuk mengontrol atas (pelaksanaan) keputusan-keputusan mereka, sehingga memiliki andil dalam keseluruhan proses kegiatan.
7	Self mobilization (mandiri)	<ul style="list-style-type: none">▪ Masyarakat mengambil inisiatif sendiri secara bebas (tidak dipengaruhi oleh pihak luar) untuk mengubah sistem atau nilai-nilai yang mereka miliki.▪ Masyarakat mengembangkan kontak dengan lembaga-lembaga lain untuk mendapatkan bantuan-bantuan teknis dan sumberdaya yang diperlukan.▪ Masyarakat memegang kendali atas pemanfaatan sumberdaya yang ada dan atau digunakan.

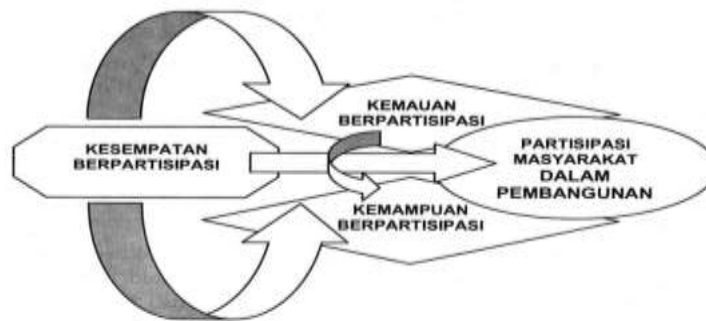
Lanjutan...

Artinya, tumbuh dan berkembangnya partisipasi masyarakat, memberikan indikasi adanya **pengakuan (aparatus) pemerintah** bahwa **masyarakat bukanlah** sekadar **obyek atau penikmat hasil pembangunan**, melainkan **subyek atau pelaku pembangunan** yang memiliki kemampuan dan kemauan yang dapat diandalkan sejak perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pemanfaatan hasil-hasil pembangunan

Tumbuh dan Berkembangnya Partisipasi Masyarakat

Slamet (1985) menyatakan bahwa tumbuh dan berkembangnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan, sangat ditentukan oleh tiga unsur pokok, yaitu:

- 1) Adanya kesempatan yang diberikan kepada masyarakat, untuk berpartisipasi;
- 2) Adanya kemauan masyarakat untuk berpartisipasi;
- 3) Adanya kemampuan masyarakat untuk berpartisipasi;



Gambar 3.1. Syarat Tumbuh dan Berkembangnya Partisipasi Masyarakat

Lanjutan...



Beberapa kesempatan yang dimaksud di sini adalah:

- a) Kemauan politik dari penguasa untuk melibatkan masyarakat dalam pembangunan, baik dalam pengambilan keputusan perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi, pemeliharaan, dan pemanfaatan pembangunan, sejak di tingkat pusat sampai di jajaran birokrasi yang paling bawah;
- b) Kesempatan untuk memperoleh informasi pembangunan;
- c) Kesempatan memanfaatkan dan memobilisasi sumberdaya (alam dan manusia) untuk pelaksanaan pembangunan;
- d) Kesempatan untuk memperoleh dan menggunakan teknologi yang tepat, termasuk peralatan/perlengkapan penunjangnya;
- e) Kesempatan untuk berorganisasi, termasuk untuk memperoleh dan menggunakan peraturan, perijinan, dan prosedur kegiatan yang harus dilaksanakan;
- f) Kesempatan mengembangkan kepemimpinan yang mampu menumbuhkan, menggerakkan, dan mengembangkan serta memelihara partisipasi masyarakat.

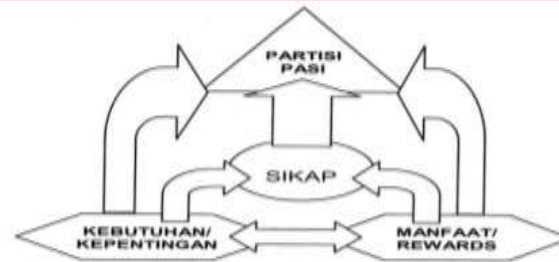
Lanjutan...



Yang dimaksud dengan kemampuan di sini adalah:

- a) Kemampuan untuk menemukan dan memahami kesempatan-kesempatan untuk membangun, atau pengetahuan tentang peluang untuk membangun (memperbaiki mutu hidupnya);
- b) Kemampuan untuk melaksanakan pembangunan, yang dipengaruhi oleh tingkat pendidikan dan keterampilan yang dimiliki;
- c) Kemampuan untuk memecahkan masalah yang dihadapi dengan menggunakan sumberdaya dan kesempatan (peluang) lain yang tersedia secara optimal

Faktor-faktor yang berpengaruh terhadap tumbuh berkembangnya partisipasi



Gambar 3.2. Faktor-faktor yang berpengaruh terhadap tumbuh berkembangnya partisipasi

- Dalam konsep psikologi, tumbuh dan berkembangnya partisipasi masyarakat, sangat ditentukan oleh motivasi yang melatar-belakanginya, yang merupakan cerminan dari dorongan, tekanan, kebutuhan, keinginan, dan harapan-harapan yang dirasakan;
- Secara sosiologis, sikap merupakan fungsi dari kepentingan;
- Dengan demikian, tumbuh dan berkembangnya partisipasi dalam masyarakat, akan sangat ditentukan oleh persepsi masyarakat terhadap tingkat kepentingan dari pesan-pesan yang disampaikan kepadanya;

Lanjutan...



- d) Menurut konsep proses pendidikan, partisipasi merupakan tanggapan atau respon yang diberikan terhadap setiap rangsangan atau stimulus yang diberikan, yang dalam hal ini, respon merupakan fungsi dari manfaat atau reward yang dapat diharapkan;
- e) Besarnya harapan, dalam konsep ekonomi, sangat ditentukan oleh besarnya peluang dan harga dari manfaat yang akan diperoleh;

Masalah-masalah Partisipasi Masyarakat



Soetrisno (1995) mengidentifikasi beberapa masalah yang berkaitan dengan pengembangan partisipasi masyarakat dalam pembangunan sebagai berikut:

- a) Masalah pertama dan terutama dalam pengembangan partisipasi masyarakat adalah, belum dipahaminya makna sebenarnya tentang partisipasi oleh pihak perencana dan pelaksana pembangunan;
 1. Pada tataran perencanaan pembangunan, partisipasi didefinisikan sebagai kemauan masyarakat untuk secara penuh mendukung pembangunan yang direncanakan dan ditetapkan sendiri oleh (aparatus) pemerintah, sehingga masyarakat bersifat pasif dan hanya sebagai subordinasi pemerintah;
 2. Pada pelaksanaan pembangunan di lapangan, pembangunan yang dirancang dan ditetapkan oleh pemerintah didefinisikan sebagai kebutuhan masyarakat, sedang yang dirancang dan ditetapkan masyarakat didefinisikan sebagai keinginan masyarakat yang memperoleh prioritas lebih rendah;

Lanjutan...



- 3) Partisipasi masyarakat, sering didefinisikan sebagai kerja-sama pemerintah dan masyarakat yang tidak pernah memperhatikan adanya sub-sistem yang disubordinasikan oleh supra-sistem; dan aspirasi masyarakat cukup diakomodasikan dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan.
- b) Masalah kedua adalah, dengan dikembangkannya pembangunan sebagai ideologi baru yang harus diamankan dengan dijaga ketat, yang mendorong aparat pemerintah bersifat otoriter. Kondisi seperti itu, dapat menimbulkan reaksi balik berupa "budaya diam" yang pada gilirannya menumbuhkan keengganan masyarakat untuk berpartisipasi karena dianggap "asal beda" atau "waton suloyo";
- c) Masalah ketiga adalah, banyaknya peraturan yang meredam keinginan masyarakat untuk berpartisipasi



Thanks!

Any questions?

You can find me at IG:
[@beltahmamero](#)